

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.B. Loebis, 1976, *Jual Beli Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta.
- A. Soehadi, 1979, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Antony Allott, 1980, *The Limits of Law*, Butterworths, London.
- Arie S. Hutagalung, 2005, *Perlindungan Pemilikan Tanah dari Sengketa Menurut Hukum Tanah Nasional*, Tebaran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Publishing, St. Paul.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harun Al-Rashid, 1986, *Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1993, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota.
- Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda, Teori Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

- J.B. Soesanto, *Hukum Agraria I*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.
- John Locke. 1689, *Second Treatise on Government*. dikutip oleh Rock Deborah. 2001, *Property Law & Human Right*. First Published. Blackstone Press Limited Aldine Place, London.
- Maria S.W. Sumardjono. *Puspita Serangkum, Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Jakarta.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cet. 4, Alumni, Bandung.
- Roger Cotterrell, 1992, *The Sociology of Law: An Introduction*, Dublin, Edinburgh: Butterworths, London.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjachran Basah, 1997, *Existensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua, Sinar Grafik, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet. VIII, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudargo Gautama, Ellyda T. Soetijarto, 1997, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunario Basuki, *Garis Besar Hukum Tanah Indonesia Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah*, Program Spesialis Notariat FHUI.

_____, *Ketentuan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang Menjadi Dasar dan Landasan Hukum Pemilikan dan Penguasaan Tanah*, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

_____, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta)*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, h. 25.

Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT).

Website:

Bambang S.Oyong, 2013, "Peraturan KBPN Nomor 8 tahun 2012," Peraturan nomor 8 tahun 2012 dalam kajian Tugas Pekerjaan PPAT, diakses pada tanggal 18 Juni 2017, URL : <http://bambangoyong.blokspot.com/2013/01/normal-0-false-false-false-en-us-X-none-html>, diakses pada 21 Juli 2017.

Herman Teja Buwana, Wewenang Notaris Dan PPAT Masih Menyisakan Persoalan,, <http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/wewenang-notaris-dan-ppat-masih.html>, diakses tanggal 2 Juli 2017

www.legalakses.com/pembuatan-akta-jual-beli-ajb-tanah/ diakses tanggal 13 Agustus 2017